

**ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DESA  
TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI *ACCOUNTING INFORMATION  
SYSTEM* PADA DESA-DESA DI KABUPATEN MADIUN**

**Diyah Santi Hariyani, SE., M.Si  
STIE Dharma Iswara Madiun**

**Muhamad Agus Sudrajat, SE., M.Si  
STIE Dharma Iswara Madiun**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa aparatur pemerintahan desa berpengaruh terhadap penggunaan teknologi *accounting information system* pada desa-desa di Kabupaten Madiun sehingga mempermudah aparatur pemerintahan desa dalam hal pengelolaan dan penataan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dengan menggunakan teknologi informasi berbasis komputer akuntansi dan pengelolaan keuangan desa, khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah desa yang andal, tepat waktu, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur perangkat desa yang ada di Kabupaten Madiun. Sampel 163 Aparatur Perangkat Desa Sub Bagian/Tata Kelola Keuangan yang ada di Kabupaten Madiun. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dengan perhitungan skala Likert. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas data, uji asumsi klasik (uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi). Sedangkan untuk pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan perhitungan statistik regresi linier menggunakan rumus  $AIS = \alpha + \beta \text{Kompetensi} + e$

Hasil pengujian menunjukkan, bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemanfaatan/Penggunaan Teknologi *Accounting Information System* (AIS) pada Desa-Desa di Kabupaten Madiun.

**Kata Kunci :** Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Pemanfaatan/Penggunaan AIS.

**PENDAHULUAN**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bagaikan sebuah oase di tengah padang pasir yang sangat luas dalam konteks ini undang-undang ini lahir di tengah kebingungan dan kegalauan masyarakat desa yang tidak bisa berbuat banyak terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh masyarakat di desa bersangkutan, oleh karena minimnya sumber daya keuangan yang dijadikan modal utama untuk mengembangkan desa bersangkutan terlepas dari pilihan lain, yaitu memanggil investor untuk menanam modal di desa yang bersangkutan, tentunya masing-masing pilihan memiliki konsekuensi logis yang tidak terelakkan.

Langkah konkrit berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk meningkatkan daya saing masyarakat desa dari segi sumber daya khususnya modal untuk pengembangan desa dalam rangka menunjang dilakukannya pembangunan desa adalah dengan mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan redistribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak dan redistribusi daerah (Pasal 72

ayat (3)) dan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) (Pasal 72 ayat (4)), serta sumber dana lain yang berasal dari masyarakat maupun pendapatan lain yang sah (PP Nomor 60 Tahun 2014).

Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah (Sugijanto, 2002). Untuk itu pemerintahan desa berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan desa, dan menyalurkan informasi keuangan desa kepada masyarakat agar transparansi dan akuntabilitas terjamin.

Teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal (Komputer, W., 2003). Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor penggunaan teknologi informasi di pemerintahan desa belum optimal.

Penelitian mengenai sumber daya manusia yang dilakukan oleh Dedi (2007) menyatakan bahwa kemudahan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap manfaat dirasakan. Pemerintah Kota Palembang merasakan manfaat penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada sektor publik. Penelitian Alimbudiono dan Fidelis (2004) juga memberikan temuan empiris bahwa pegawai berlatar belakang pendidikan akuntansi di sub bagian akuntansi Pemerintah XYZ masih minim, *job description*-nya belum jelas, dan pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik belum dilaksanakan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan masih belum memadai terutama adalah pemerintahan desa.

Choirunisah (2008) dengan penelitiannya kualitas informasi laporan keuangan SAI, kemampuan SDM, dukungan pimpinan dan alat, fasilitas, organisasi tim, sistem pengendalian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan organisasi tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan satuan kerja. Penelitian Roviyantie (2011) mengenai kualitas laporan keuangan, sumber daya manusia, dan sistem akuntansi keuangan di Sub bagian/tata usaha keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, hasilnya menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Penelitian berbeda dilakukan oleh Zuliarti (2012), hasilnya menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan, SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Penelitian sebelumnya masih terbatasnya pada Pemerintahan Kabupaten, peneliti tertarik untuk meneliti kapasitas kompetensi sumber daya manusia utamanya aparatur pemerintahan desa-desa yang ada di Kabupaten Madiun terhadap penggunaan teknologi *accounting information system* dalam hal pelaporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) yang transparan dan akuntabilitas publik kepada masyarakat desa.

Adapun tujuan dalam penelitian ini yang hendak dicapai adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa kompetensi aparatur pemerintahan desa berpengaruh terhadap penggunaan teknologi *accounting information system* pada Desa-Desa di Kabupaten Madiun.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Kompetensi *Human Resources***

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Menurut Dunnetts dalam anonim, *skill* adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Menurut Blanchard & Thacker (2004) dalam anonim, *skill* seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis.

Seperti yang sudah disinggung bahwa kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa masih minim khususnya pada pejabat pelaksana pengelola keuangan di 78.000 desa yang ada. Maka sebaiknya proses penyusunan laporan keuangan desa terutama dalam implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga harus merupakan tanggungjawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten. Dengan demikian, seluruh aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke desa khususnya yang berkaitan di bidang akuntansi harus dialokasikan, yaitu untuk sumberdaya manusia yang terbatas mengerjakan porsi pekerjaan yang paling spesifik untuk beberapa desa sekaligus, dan sumberdaya yang lebih banyak yaitu para perangkat desa untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih umum dan mudah dikerjakan.

Pekerjaan input transaksi dan mencocokkan saldo kas atau bank dengan fisik kas atau bank, menyusun, memberi nomor dan menyimpan bukti-bukti transaksi adalah contoh pekerjaan yang umum. Sedangkan pekerjaan melakukan *quality control* terhadap laporan keuangan agar sesuai dengan norma-norma pembukuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah pekerjaan yang spesifik.

Maka pembagian tugas diatur supaya para perangkat desa (Bendahara dan PTPKD) hanya bertanggung-jawab melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan sederhana untuk dapat melakukan input transaksi dan kode akun serta kode mata anggaran kemudian mencocokkannya dengan saldo kas atau bank atau fisik aset yang ditransaksikan, dan seterusnya.

Untuk pekerjaan *quality control* yang membutuhkan analisa lebih jauh atas suatu transaksi dan standar-standar akuntansi yang berkaitan untuk pembukuannya harus dilakukan oleh sumberdaya manusia yang disiapkan khusus untuk pekerjaan tersebut. Dan karena jumlah sumberdaya manusia yang terbatas, mereka harus dapat melayani beberapa desa sekaligus yang terdapat dalam suatu regional misalnya di tingkat provinsi atau kabupaten. Dukungan pekerjaan teknis ini pun dapat dilaksanakan sekaligus dengan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan desa yang diatur oleh UU No.6/2014 Bab XIV tentang Pembinaan dan

Pengawasan, khususnya pada pasal 115 ayat (g), dimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah termasuk mengawasi pengelolaan Keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa. Dalam profesi akuntan publik, pekerjaan *quality control* ini mirip dengan pekerjaan jasa akuntansi: kompilasi dan review yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik.

Berbagai pekerjaan akuntansi lainnya tersebut dapat diatur dalam tupoksi pejabat yang bersangkutan. Pejabat pengawas pencatatan akuntansi (*quality control*) ini merupakan ujung tombak kualitas laporan keuangan desa yang baik dan yang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP selain menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan anggaran atau yang disebut pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Otoritas terakhir dan sebagai pihak yang bertanggung-jawab atas laporan keuangan tersebut, tetap berada ditangan Kepala Desa. Setelah laporan keuangan selesai diperiksa, ditambah dan dilakukan koreksi oleh pejabat *quality control* maka laporan keuangan tersebut harus diotorisasi oleh Kepala Desa, tentunya apabila ada tambahan atau koreksi yang tidak dimengerti dapat dikomunikasikan dengan pejabat *quality control* di Pemerintah Kabupaten Madiun.

### **Teknologi Accounting Information System**

Sistem Akuntansi menurut Stettler dalam Baridwan adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi.

Sedangkan menurut Mulyadi, Sistem Akuntansi adalah organisasi dari formulir-formulir, catatan-catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen guna mempermudah pengelolaan suatu perusahaan. Dengan demikian dalam pengertian umum, sistem akuntansi meliputi keseluruhan jaringan komunikasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperlukan. Dan dari definisi tersebut, unsur suatu sistem akuntansi adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, buku pembantu serta laporan keuangan.

Sistem Informasi Akuntansi secara umum sudah diatur oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 86 yang berjudul "Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan". Sistem informasi desa ini meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Tanggung jawab pengembangan sistem informasi desa ini diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/kota. Informasi yang dikelola dalam sistem tersebut adalah informasi umum yang cenderung lebih luas dan berbeda-beda ragamnya antar kabupaten, sesuai dengan perbedaan fokus pembangunan di daerah masing-masing. Sedangkan pembahasan sistem informasi akuntansi adalah spesifik dan mempunyai standar yang sama pada seluruh desa di Indonesia seperti masa sebelumnya diatur oleh Permendagri No.37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Senada dengan itu Dr.Jan Hoesada, CPA dari Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), bahwa penyusunan PP tentang akuntansi dan pelaporan laporan keuangan desa harus dirangkai secara amat hati-hati. Diduga seluruh desa amat terbelakang dalam teknologi

akuntansi, sebagian diramalkan cepat beradaptasi, sebagian lagi amat sulit beradaptasi dengan teknologi akuntansi.

Teknologi sistem informasi akuntansi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

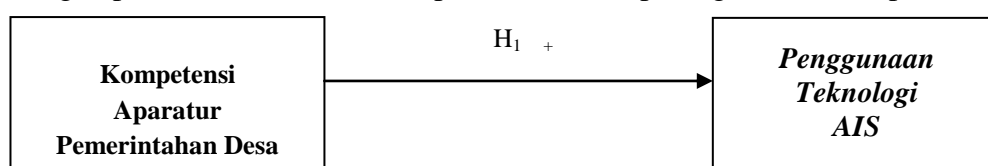
Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian-pengendalian atas keakuratan data. Sistem juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya. Hanya saja pengkomputerisasian sistem informasi akuntansi seringkali mengubah karakter aktivitas. Data mungkin dikumpulkan dengan peralatan khusus. Catatan akuntansi menggunakan lebih sedikit kertas. Kebanyakan, jika tidak semuanya, tahapan-tahapan pemrosesan dilakukan secara otomatis. Output lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak. Terlebih lagi, output dapat didistribusikan kepada orang lain yang terhubung lewat LAN.

### Perumusan Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang dikumpulkan (Arikunto 2002:64).

Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik sudah pernah dilakukan, tetapi hasilnya sangat berbeda-beda. Oleh karena itu, Peneliti mencoba untuk menguji kembali secara empiris pengaruh kompetensi aparatur pemerintahan desa terhadap kompetensi penggunaan AIS utamanya di Kabupaten Madiun. Senyampang dengan hal tersebut, pemanfaatan/penggunaan teknologisistem informasi akuntansi atas pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, multiprocessing. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Hal ini dialami oleh pemerintah daerah di Indonesia sebagaimana dikatakan oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, dalam gala dinner bersama Guru Besar Pemasaran, Philip Kotler di Jakarta. Beliau mengakui bahwa bangsa Indonesia masih belum mampu menggunakan secara maksimal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), walaupun teknologi tersebut telah tersedia (ANTARA News, 2007).

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut ini :



Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

**H1 : Kompetensi aparatur pemerintahan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan teknologi *accounting information system* pada desa-desa di Kabupaten Madiun.**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berbentuk penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang mengungkap besar atau kecilnya suatu pengaruh atau hubungan antar variabel yang dinyatakan dalam angka-angka, dengan cara mengumpulkan data yang merupakan faktor pendukung terhadap pengaruh antara variabel-variabel yang bersangkutan kemudian mencoba untuk dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang sesuai dengan variabel-variabel dalam penelitian(Sugiono, 2002).

Data dalam penelitian ini menggunakan data Primer. Data Primer adalah data yang dibuat atau dikumpulkan oleh pihak luar (Sekaran, 2013). Jenis data penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden. Kuesioner yang dibuat dalam bentuk dengan menggunakan skala Likert.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto 2002 : 108). Sedangkan menurut Sekaran (2006 : 121) Populasi mengacu pada sekelompok orang, kejadian (*event*), atau sesuatu yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan investigasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Aparatur Perangkat Desa-Desa yang ada di Kabupaten Madiun.

Sample terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran 2006: 123).Sampel penelitian ini adalah 198 Aparatur Perangkat Desa Sub Bagian/Tata Kelola Keuangan yang ada di Kabupaten Madiun.

### **Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel**

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto 2002: 96). Variabel yang dimaksud dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2(dua) kelompok yaitu :

#### **a. Variabel Independen (X)**

Variabel Independen (bebas) adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti atau penyebab utama suatu gejala (Arikunto, 2002 : 102).

Variabel Independen dalam penelitian ini terdiri atas :

- **Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa(X)**

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi aparatur pemerintahan desa. Kompetensi menurut *Guy et al.* (2002) adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.Item-item disesuaikan dengan konteks pemerintahan desa. Jumlah item pertanyaan adalah 7 item dengan skala Likert 1-5. Variabel kompetensi aparatur pemerintahan desa diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Xu, *et al.* (2003) yaitu :

1. Pemahaman tentang akuntansi
2. SDM yang berkualitas
3. Sumber daya yang memadai

4. Peran dan tanggung jawab
5. Pelatihan keahlian dalam tugas
6. Sosialisasi peraturan baru
7. Pemahaman tentang struktur organisasi

#### **b. Variabel Dependen (Y)**

Variabel Dependen (terikat) adalah variabel yang besarnya tergantung dari variabel bebas yang diberikan dan diukur untuk menentukan ada tidaknya pengaruh (kriteria) dari variabel bebas (Arikunto 2002 : 102).

- **Penggunaan *Accounting Information System* (Y)**

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009).

Jumlah item pertanyaan adalah 6 item dengan skala Likert 1-5. Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan indikator yaitu :

- a. Sistem akuntansi yang sesuai SAP dan SOP
- b. Jaringan internet
- c. Jaringan internet termanfaatkan dengan baik
- d. Aplikasi yang digunakan
- e. Laporan keuangan terkomputerisasi
- f. *Software* sesuai dengan UU

#### **Teknik Analisis Data**

Metode analisis data merupakan cara yang utama digunakan untuk mengolah data yang terkumpul sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan langkah sebagai berikut :

##### **1. Uji Validitas**

Sebuah instrumen dikatakan *valid* jika mampu mengukur yang diinginkan oleh peneliti, serta dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang dikumpulkan tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Cara pengujian validitas dengan menghitung korelasi antar skor masing-masing pertanyaan dan skor total dengan menggunakan rumus korelasi *Product Moment* (Arikunto, 2006 : 170).

##### **2. Uji Reliabilitas**

Reliabilitas adalah merupakan *indeks* yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus *Alpha Cronbach* (Arikunto, 2006:196).

##### **3. Uji Asumsi Klasik**

###### **a. Uji Normalitas Data**

Uji ini digunakan dalam tahap awal dalam metode pemilihan analisis data. Jika data normal digunakan uji parametrik dan jika data tidak normal digunakan non parametrik

atau *treatment* agar data normal. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dalam bentuk distribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data, peneliti menggunakan analisis grafik dan analisis statistik. Dalam analisis grafik, dilakukan dengan melihat grafik histogram dan *normal probability plot*. Sedangkan dalam analisis statistik dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov (Uji KS) (Ghozali 2006).

Dasar pengambilan keputusannya adalah:

- a. Jika  $\alpha > 0,05$ , maka data terdistribusi normal.
- b. Jika  $\alpha < 0,05$ , maka data terdistribusi tidak normal.

**b. Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolonieritas dideteksi dengan menggunakan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF=1/tolerance$ ) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan  $VIF < 10$  (Ghozali 2006).

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendekati heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatter plot* antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika ada titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2006).

**d. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali 2006). Uji Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson.

**Regresi Linear**

Hipotesis akan diuji dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persamaan regresi linier, karena selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali 2006). Cara yang untuk mengestimasiya adalah suatu persamaan secara garis lurus. Analisis regresi dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor yang dipengaruhi oleh variabel-variabel yang memengaruhi. Dalam penelitian ini regresi dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana variabel penggunaan *accounting information system* dipengaruhi oleh variabel skor kompetensi aparatur pemerintahan desa-desa di Kabupaten Madiun.



Model yang dikembangkan untuk pengujian adalah :

$$AIS = \alpha + \beta \text{Kompetensi} + e$$

Dimana :

AIS : Penggunaan *Accounting Information System*

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien regresi Kompetensi Aparatur Pemerintahan  
Desa

e : *Error* (tingkat kesalahan)

#### 4. Pengujian Hipotesis

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali 2006) secara parsial dengan  $\alpha = 0,05$  dan juga penerimaan atau penolakan hipotesis, maka cara yang dilakukan adalah :

a. Merumuskan Hipotesis

Ho : Tidak terdapat pengaruh Kompetensi terhadap Penggunaan teknologi AIS

Ha : Terdapat pengaruh Kompetensi terhadap Penggunaan teknologi AIS

b. Batasan t-hitung (Ghozali, 2006).

Ho diterima jika : t-hitung  $\leq$  t-tabel atau Sig. p  $> 0,05$

Ha diterima jika : t-hitung  $>$  t-tabel atau Sig. p  $\leq 0,05$

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 1. Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara penyebaran kuesioner ke 198 Aparatur Perangkat Desa Sub Bagian/Tata Kelola Keuangan yang ada di Kabupaten Madiun. Kuesioner kembali sebanyak 163 kuesioner dan tidak kembali sebanyak 35 kuesioner. Berikut ini adalah frekuensi hasil pengumpulan data berdasarkan jenis kelamin, masa kerja dan tingkat pendidikan :

Tabel 1. Jenis\_Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid L	122	74.8	74.8	74.8
P	41	25.2	25.2	100.0
Total	163	100.0	100.0	

**Tabel 2. Masa\_Kerja**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 5 tahun	20	12.3	12.3	12.3
> 10 tahun	87	53.4	53.4	65.6
5 - 10 tahun	56	34.4	34.4	100.0
Total	163	100.0	100.0	

**Tabel 3  
Pendidikan\_Terakhir**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid -	89	54.6	54.6	54.6
D3	8	4.9	4.9	59.5
S1	66	40.5	40.5	100.0
Total	163	100.0	100.0	

## 2. Uji Validitas & Uji Reliabilitas

Berdasarkan uji validitas menunjukkan semua indikator dinyatakan valid semua, hal ini ditandai dengan nilai *Corrected Item – Total Correlation* >  $r_{\text{tabel}}$  (0,1293). Pembuktian ini menunjukkan bahwa semua indikator (*observed*) layak digunakan sebagai indikator penelitian dan dapat dianalisis lebih lanjut. Hasil Uji Validitas dapat dilihat pada tabel 4 dan tabel 5 berikut ini :

**Tabel 4. Uji Validitas Variabel Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa  
Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan1_X	29.60	6.958	.133	.209
Pernyataan2_X	29.38	6.657	.153	.194
Pernyataan3_X	29.23	6.884	.120	.216
Pernyataan4_X	28.50	7.523	.162	.210
Pernyataan5_X	28.79	7.969	.220	.281
Pernyataan6_X	28.85	7.250	.155	.205
Pernyataan7_X	29.11	6.852	.192	.179
Pernyataan8_X	28.87	6.759	.181	.163
Pernyataan9_X	28.77	7.390	.197	.231
Pernyataan10_X	30.50	9.017	.271	.404

**Tabel 5. Uji Validitas Variabel Penggunaan *Accounting Information System***  
**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan1_Y	20.53	10.039	.264	.282
Pernyataan2_Y	20.10	11.879	.148	.384
Pernyataan3_Y	20.59	10.494	.182	.323
Pernyataan4_Y	20.60	9.246	.347	.229
Pernyataan5_Y	21.14	9.196	.337	.232
Pernyataan6_Y	21.45	9.897	.180	.321
Pernyataan7_Y	20.71	12.038	.163	.436
Pernyataan8_Y	20.82	11.495	.145	.432

Uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* untuk kompetensi aparatur pemerintahan desa sebesar 0,854; dan penggunaan *accounting information system* sebesar 0,868; karena nilai *cronbach alpha* > dari 0,60; maka variabel penelitian ini dinyatakan *reliabel*. Tampak pada tabel 6 dan tabel 7 berikut ini :

**Tabel 6**  
**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.854	10

**Tabel 7**  
**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.868	8

### 3. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S), hasilnya sebagai berikut :

**Tabel 8. Uji Normalitas Data**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		KOMPETENSI	PEMANFAATAN_A IS
N		163	163
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	32.40	22.61
	Std. Deviation	2.890	2.754
Most Extreme Differences	Absolute	.104	.090
	Positive	.097	.086
	Negative	-.104	-.090
Kolmogorov-Smirnov Z		1.326	1.154
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069	.139

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 8 di atas, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kompetensi aparatur pemerintahan desa sebesar dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pemanfaatan *accounting information system* adalah 0.139. Karena probabilitas signifikansi > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

**4. Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), yang hasilnya sebagai berikut :

**Tabel 9**  
**Uji Normalitas Data**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

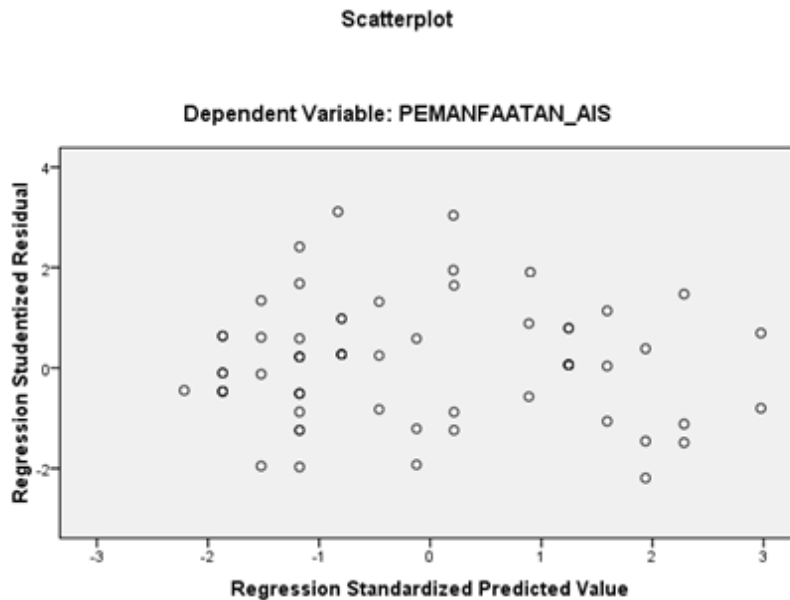
Model	KOMPETENSI	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	KOMPETENSI	1.000	1.000

a. Dependent Variable: PEMANFAATAN\_AIS

Hasil perhitungan nilai *Tolerance* dan nilai VIF menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* < 0.10 atau VIF > 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

**5. Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan memplotkan grafik antara SRESID (*Studentized Residual*) untuk Y dengan ZPRED (*Standardized Predicted Value*) untuk X di mana gangguan heteroskedastisitas akan tampak dengan adanya pola tertentu pada grafik. Berikut adalah uji heteroskedastisitas pada kedua model penelitian ini :



**Gambar 2**  
**Scatterplot Uji Heteroskedastisitas**

Dari grafik Scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak / titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 6. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan uji Durbin-Watson(DW), hasil pengujian autokorelasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 10. Uji Autokorelasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.066 <sup>a</sup>	.014	.012	2.757	1.962

a. Predictors: (Constant), KOMPETENSI

b. Dependent Variable: PEMANFAATAN\_AIS

Dari hasil output di atas didapat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,962. Sedangkan dari Tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 163, serta jumlah variabel independen (k) = 1 diperoleh nilai batas bawah (dL) sebesar 1.5834 dan batas atas (dU) sebesar 1.6413. Karena nilai DW = 1,962 > dU = 1.6413, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi positif pada model regresi.

## 7. Analisis Regresi Linear

**Tabel 11. Analisis Regresi Linier Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa Terhadap Pemanfaatan AIS Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.584	2.438		8.444	.000
	KOMPETENSI	.062	.075	.066	.833	.406

a. Dependent Variable: PEMANFAATAN\_AIS

Berdasarkan tabel 11 di atas, dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$PEMANFAATAN AIS = 20,664 + 0,062KOMPETENSI + e$$

- Konstanta sebesar 20.584 dapat diartikan bahwa Y (penggunaan teknologi AIS) akan bernilai 20.584, jika Kompetensi aparatur pemerintahan desa masing-masing bernilai 0.
- Koefisien regresi 0,062 menyatakan bahwa setiap penambahan satu persen variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, maka akan meningkatkan penggunaan teknologi *accounting information system* sebesar 0.310.

## 8. Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t pengaruh kompetensi aparatur pemerintahan desa terhadap Pemanfaatan AIS menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur

pemerintahan desamemiliki nilai t-hitung  $0,833 < 1,658$  (t-tabel) sedangkan nilai *signifikansi p-value* sebesar  $0,406$  ( $p\text{-value} > 0,05$ ). Hasil pengujian ini menunjukkan variabel kompetensi aparatur pemerintahan desasecara statistik tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan teknologi *accounting information system*. Berdasarkan pengujian dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Pertama (H1) adalah **Ditolak**. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuliarti (2012).

## **PENUTUP**

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris bahwa kompetensi aparatur pemerintahan desa berpengaruh terhadap pemanfaatan/penggunaan teknologi *accounting information system* pada Desa-Desa di Kabupaten Madiun. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap 163 Aparatur Perangkat Desa Sub Bagian/Tata Kelola Keuangan yang ada di Kabupaten Madiun diperoleh kesimpulan, bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemanfaatan/penggunaan teknologi *accounting information system* pada Desa-Desa di Kabupaten Madiun.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah sampel hanya desa-desa di Kabupaten Madiun belum mewakili dari wilayah NKRI. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menggunakan variabel bebas lainnya dalam pengujian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 05 No. 02. Hal. 18-30.
- ANTARA News. 7 Agustus 2007. Wapres Akui Pemanfaatan TIK Belum Maksimal.
- Anthony, Robert N. dan Vijay Govindarajan. 2004. Sistem Pengendalian Manajemen, Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra, 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
- Choirunisah, Fariziah. 2008. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi. Tesis UGM, Yogyakarta.
- Cooper, Donald R. & Pamela S. Schindler. 2003. *Business Research Method*. Eight Edition. Mc Graw Hill
- Dedi Rianto Rahardi. 2007. *Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pelayanan Sektor Publik. Seminar Nasional teknologi 2007*.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Februari.

- Hevesi, G. Alan. 2005. *Standards for Internal Control in New York State Government*. [www.osc.state.ny.us](http://www.osc.state.ny.us).
- Indriantoro, Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit : Andi Pustaka. Jogjakarta.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No. 1, Hal. 1-17.
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach*. John Wiley and Sons Inc, New York.
- Sekaran, Uma. 2013. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugijanto. 2002. Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. *Lintasan Ekonomi*. Volume XIX Nomor 1. Hal. 50-66.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV Alfabeta
- Sujianto, Agus Eko. 2002. Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Struktur Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang *Go Public* di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol.2, No.2, Desember 2001: Hal.125 – 138.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Permendagri Nomor 37 Tahun 2007
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
- Wahana Komputer. 2003. *Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, & Bernard Wong-On-Wing. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.
- Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus.

